



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jambi, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar perangkat daerah mendahului penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara diantaranya melalui penetapan peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan memberitahukan kepada pimpinan dewan
perwakilan rakyat daerah;

c.bahwa berdasarkan.....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9);
19. Surat Gubernur Jambi Nomor 900/881/SETDA.BAKEUDA/IV/2017 tanggal 13 April 2017 hal Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), diubah lagi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c, angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	127.865.952.204,00
b. Dana Perimbangan	Rp	912.311.763.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	171.911.288.237,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.212.089.003.441,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	518.184.219.087,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	8.590.600.000,00

5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp	1.041.337.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	202.333.954.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>20.686.895.856,51</u>
	Rp	751.443.749.963,51
b. Belanja Langsung :		
1). Belanja Pegawai	Rp	48.674.490.400,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	268.230.386.005,49
3). Belanja Modal	Rp	<u>142.796.762.044,00</u>
	Rp	459.701.638.449,49
Jumlah Belanja	Rp	1.211.145.388.413,00
Surplus	Rp	943.615.028,00
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>943.615.028,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	943.615.028,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00		

2. Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

3. Ringkasan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

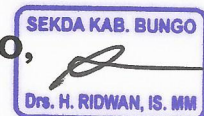
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9-5-2017



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

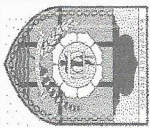


Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 9-5-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran I Penjabaran
Nomor
Tanggal

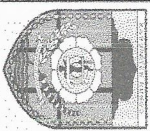
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.196.830.843.441,00	1.212.089.003.441,00	15.258.160,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.015.527.948,00	4.015.527.948,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.810.734.000,00	3.810.734.000,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	91.384.890.256,00	91.384.890.256,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	912.053.603.000,00	912.311.763.000,00	258.160,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	68.394.813.000,00	68.652.973.000,00	258.160,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.023.765.000,00	202.023.765.000,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	156.911.288.237,00	171.911.288.237,00	15.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.003.405.237,00	47.003.405.237,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	109.907.883.000,00	109.907.883.000,00	
2	BELANJA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.195.887.228.413,00	1.211.145.388.413,00	15.258.160,00
2.1.2	Belanja Bunga	751.443.749.963,51	751.443.749.963,51	
2.1.3	Belanja Subsidi	518.184.219.087,00	518.184.219.087,00	
2.1.4	Belanja Hibah	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	606.744.000,00	606.744.000,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.590.600.000,00	8.590.600.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.041.337.000,00	1.041.337.000,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	202.333.954.020,00	202.333.954.020,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	
2.2.1	Belanja Pegawai	444.443.478.449,49	459.701.638.449,49	15.258.160,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.477.690.400,00	48.674.490.400,00	196.800,00
2.2.2		268.315.609.285,49	268.230.386.005,49	(85.223.280,00)

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2.2.3	Belanja Modal	127.650.178,764,00	142.796.762,044,00	15.146.583,28
		943.615.028,00	943.615.028,00	
3	PENYERTAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00	943.615.028,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00	943.615.028,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

Muara Bungo, 9

BUPATI

H. MA



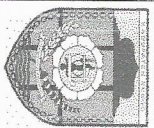
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Ia
Penjabar
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DA
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3			
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6	
4	PENDAPATAN	1.196.830.843.441,00	1.212.089.003.441,00	15.258.160.000,00		1,27	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	0,00		0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.1	Pajak Hotel	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.1.01	Hotel Bintang Tiga	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.01.04	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.1.03	Pajak Hiburan	459.500.000,00	459.500.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	340.000,00	340.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.05	Pameran	675.000,00	675.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.07	Karaoke	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.10	Permainan Biliar	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	610.000,00	610.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.1.04	Pajak Reklame	1.650.300.000,00	1.650.300.000,00	0,00		0,00	
4.1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.02	Reklame Kain	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.1.04.11	Reklame Banner	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00		0,00	Perda No 3 Tahun

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.04
Organisasi : 4.04.01
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02

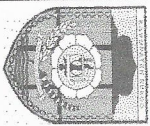
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.04.4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN				
4.04.4.04.01.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN				
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak				
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	1.068.964.891.237,00	1.084.223.051.237,00	15.258.160.000,00	1,43
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	912.053.603.000,00	912.311.763.000,00	258.160.000,00	0,03
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	68.394.813.000,00	68.652.973.000,00	258.160.000,00	0,38
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.761.127.000,00	27.761.127.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	18.474.580.000,00	18.474.580.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	9.286.547.000,00	9.286.547.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	40.633.686.000,00	40.891.846.000,00	258.160.000,00	0,64
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	811.391.000,00	811.391.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	204.577.000,00	204.577.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	12.269.839.000,00	12.269.839.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	12.019.846.000,00	12.019.846.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Khusus	13.834.909.000,00	13.834.909.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	258.160.000,00	258.160.000,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3		641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01		641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3		202.023.765.000,00	202.023.765.000,00	0,00	0,00
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3.01		112.453.200.000,00	112.453.200.000,00	0,00	0,00

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
1.03.103.03.39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya Belanja Jasa Kantor Belanja jasa kerja Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Cetak Belanja Pengandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.450.000,00	228.450.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan
1.03.103.03.39.05		228.450.000,00	228.450.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.1		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.1.01		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.1.01.01		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2		217.650.000,00	217.650.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.01		3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.01.01		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.01.04		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.03		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.03.12		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.06		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.06.01		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.06.02		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.15		12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.03.103.03.39.05.5.2.2.15.01		12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(97.215.442.992,51)	(112.215.442.992,51)	(15.000.000.000,00)	15,43	

Lokasi Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran II
Penjabaran
Nomor
Tanggal

Urusan Pemerintahan : 1.03
Organisasi : 1.03.03
Sub Unit Organisasi : 1.03.03.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
1.03.1.03.03.00.00.4	PENDAPATAN	674.275.685,00	674.275.685,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	674.275.685,00	674.275.685,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	674.275.685,00	674.275.685,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	674.275.685,00	674.275.685,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.4.1.2.02.32	Retribusi Pemakaian Alat Berat	674.275.685,00	674.275.685,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5	BELANJA	97.889.718.677,51	112.889.718.677,51	15.000.000.000,00	15,32		
1.03.1.03.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.323.783.178,00	4.323.783.178,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00	Non Kegiatan	4.323.783.178,00	4.323.783.178,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.323.783.178,00	4.323.783.178,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.591.963.178,00	3.591.963.178,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.708.451.235,00	2.708.451.235,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	301.461.729,00	301.461.729,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	123.656.400,00	123.656.400,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	136.270.470,00	136.270.470,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	180.807.688,00	180.807.688,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.170.464,00	51.170.464,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.576,00	58.576,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	77.397.372,00	77.397.372,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.639.640,00	5.639.640,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	7.049.604,00	7.049.604,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	731.820.000,00	731.820.000,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	731.820.000,00	731.820.000,00		0,00		0,00
1.03.1.03.03.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	93.565.935.499,51	108.565.935.499,51	15.000.000.000,00	16,03		

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.03.03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	D
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6			
1	2	3	4					
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Pengadaan Aset Tetap BLUD	4.727.837.250,00	4.727.837.250,00	0,00	0,00			
6	SURPLUS / (DEFISIT)	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00			
6.1	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1.04.12	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00			
6.2.2	Penyerataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00			
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00			
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00			
PEMBIAYAAN NETTO		(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	0,00	0,00			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	0,00	0,00

Muara Bungo, 9
 BUPATI
 H. MAS